

**HUKUM KEPARIWISATAAN**

**ANALISIS OBJEK PARIWISITA DI PULAU MANDEH**

*Disusun Guna Memenuhi Tugas Perkuliahan Hukum Kepariwisata*



**DISUSUN OLEH:**

**Syifa Agya Putri**

**111122040060**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

**2023/2024**

## **DAFTAR ISI**

<b>Kata Pengantar</b> .....	3
<b>BAB I</b> .....	4
<b>Pendahuluan</b> .....	4
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	4
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	5
<b>BAB II</b> .....	6
<b>PEMBAHASAN</b> .....	6
<b>2.1 Konsep Pariwisata Keberlanjutan</b> .....	6
<b>2.2 Prinsip Hukum Lingkungan Dalam Pariwisata</b> .....	7
<b>2.3 Hak-Hak Masyarakat Adat dalam Konteks Pariwisata di Kepulauan Mandeh</b> .....	9
<b>2.4 Peraturan Kepemilikan Tanah dan Pembangunan Infrastruktur dalam Pengembangan Pariwisata di Kepulauan Mandeh</b> .....	10
<b>KESIMPULAN</b> .....	12
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	13

## **Kata Pengantar**

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat, karunia dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul “ANALISIS OBJEK PARIWISITA DI PULAU MANDEH” dengan lancar dan tepat waktu. Tidak lupa shalawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang telah membawa kita dari jaman kegelapan menuju jaman terang-benderang seperti sekarang.

Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ikomatussaniah selaku dosen pengampu Mata Kuliah Hukum Kepariwisata yang telah memberi arahan kepada kami baik secara moral maupun materi. Terima kasih pula kepada teman-teman yang telah mendukung kami sehingga bisa menyelesaikan makalah ini dengan baik.

Makalah ini berisikan tentang Prinsip-Prinsip definisi system, syariah islam, juga arti dari kebangsaan. Selain itu, pokok dari makalah ini adalah membahas bagaimana korelasi system syariah islam dengan konteks kebangsaan. Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan kami terima dengan lapang dada.

Padang, 17 April 2024

Penulis

# **BAB I**

## **Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang**

Kepulauan Mandeh, yang terletak di sekitar Padang, Sumatera Barat, telah menjadi sorotan sebagai salah satu destinasi pariwisata potensial di Indonesia. Dengan keindahan alamnya yang menakjubkan, termasuk pantai berpasir putih, terumbu karang yang indah, dan kekayaan hayati laut yang melimpah, Kepulauan Mandeh menarik perhatian baik dari wisatawan lokal maupun internasional.

Namun, pengembangan pariwisata di Kepulauan Mandeh tidak hanya melibatkan aspek-aspek wisata semata. Tantangan-tantangan hukum juga menjadi fokus penting dalam mengelola dan mengembangkan destinasi ini. Aspek-aspek hukum yang relevan termasuk regulasi perlindungan lingkungan, hak-hak masyarakat adat, kepemilikan tanah, perencanaan tata ruang, dan pembangunan infrastruktur pariwisata.

Pengaturan hukum yang jelas dan berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa pengembangan pariwisata di Kepulauan Mandeh berlangsung secara berkelanjutan, memperhatikan keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat setempat. Oleh karena itu, penyelidikan mendalam mengenai aspek hukum pariwisata di Kepulauan Mandeh menjadi sangat penting untuk memahami tantangan, potensi, dan solusi yang terlibat dalam pengembangan destinasi ini.

Melalui makalah ini, akan dilakukan analisis menyeluruh tentang kerangka hukum yang mengatur pariwisata di Kepulauan Mandeh, menyoroti isu-isu utama yang muncul, dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang aspek hukum ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan pariwisata yang bertanggung jawab dan berdampak positif bagi semua pihak yang terlibat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kerangka hukum yang mengatur pengembangan pariwisata di Indonesia, khususnya terkait dengan Kepulauan Mandeh?
2. Apa saja tantangan hukum utama yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata di Kepulauan Mandeh, Padang?
3. Bagaimana regulasi lingkungan dan hak-hak masyarakat adat berperan dalam pengelolaan pariwisata di Kepulauan Mandeh?
4. Bagaimana peraturan tentang kepemilikan tanah dan pembangunan infrastruktur memengaruhi pengembangan pariwisata di Kepulauan Mandeh?
5. Apa implikasi dari rencana tata ruang wilayah terhadap pengembangan pariwisata di Kepulauan Mandeh?

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **2.1 Konsep Pariwisata Keberlanjutan**

Konsep pariwisata berkelanjutan menjadi sangat penting ketika pariwisata Kepulauan Mandeh berkembang. Pariwisata yang berkelanjutan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tetapi juga mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam hal Kepulauan Mandeh, penerapan konsep pariwisata berkelanjutan menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa pengembangan pariwisata tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi tetapi juga melindungi kekayaan alam dan budaya lokal.

Perlindungan lingkungan adalah komponen penting dari gagasan pariwisata berkelanjutan. Kepulauan Mandeh dikenal karena keindahan alamnya yang luar biasa, termasuk ekosistem laut yang kaya akan biodiversitas dan terumbu karang yang indah. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengendalikan limbah, mengurangi polusi, dan melestarikan sumber daya alam. Upaya ini tidak hanya akan mempertahankan keindahan alam Kepulauan Mandeh untuk generasi berikutnya, tetapi juga akan menjaga keseimbangan ekosistem, yang sangat penting untuk ekonomi lokal dan pertumbuhan pariwisata.

Selain itu, pariwisata berkelanjutan menekankan betapa pentingnya mempertahankan keberagaman budaya dan kemakmuran masyarakat lokal. Kepulauan Mandeh memiliki warisan budaya, tradisi, dan adat istiadat lokal yang luar biasa. Pengembangan industri pariwisata harus memastikan bahwa budaya dan identitas lokal dihormati dan dipromosikan, bukan diubah atau diganggu. Peluang ekonomi yang dihasilkan oleh pariwisata dan partisipasi dalam pengambilan keputusan membutuhkan pemberdayaan masyarakat lokal.

Dengan menerapkan konsep pariwisata berkelanjutan, pengembangan pariwisata di Kepulauan Mandeh dapat menjadi model bagi destinasi pariwisata lainnya. Langkah-langkah konkret seperti pengelolaan yang bijaksana terhadap sumber daya alam, promosi keadilan sosial, dan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan pariwisata akan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan pariwisata yang berkelanjutan di Kepulauan Mandeh. Dengan demikian, konsep pariwisata berkelanjutan tidak hanya memberikan panduan praktis,

tetapi juga menjadi landasan moral untuk menjaga kelestarian alam dan budaya di destinasi wisata yang begitu istimewa ini.

## **2.2 Prinsip Hukum Lingkungan Dalam Pariwisata**

Pengembangan pariwisata di Kepulauan Mandeh bergantung pada prinsip-prinsip hukum lingkungan untuk memastikan bahwa aktivitas pariwisata dapat berlangsung secara berkelanjutan sambil mempertahankan kelestarian lingkungan. Kepulauan Mandeh adalah tempat yang indah dengan keanekaragaman hayati laut yang luar biasa, terumbu karang yang menakjubkan, hutan mangrove yang luas, dan banyak lagi. Oleh karena itu, ketika datang ke pengembangan pariwisata di wilayah ini, perlindungan sumber daya alam dan ekosistem menjadi prioritas utama.

Pertama-tama, ekosistem Kepulauan Mandeh yang sensitif harus dijaga agar pariwisata tidak merusaknya. Ini termasuk pengelolaan limbah yang tepat, pembatasan akses ke area konservasi, dan penerapan regulasi yang ketat terhadap aktivitas yang dapat merusak lingkungan. Pengendalian polusi dan limbah merupakan komponen penting dalam menjaga kualitas lingkungan Kepulauan Mandeh. Fasilitas pengelolaan limbah yang baik, serta penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam akomodasi dan transportasi, adalah langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan oleh lingkungan.

Selain itu, prinsip-prinsip hukum lingkungan menekankan betapa pentingnya menjaga sumber daya alam dan menghentikan dampak perubahan iklim. Pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan memerlukan perlindungan keanekaragaman hayati, keberlanjutan ekosistem, dan pengurangan jejak karbon dari aktivitas pariwisata. Perlu ada kebijakan yang mendorong penggunaan energi terbarukan, penanaman kembali hutan mangrove, dan kampanye yang meningkatkan kesadaran lingkungan bagi wisatawan dan masyarakat lokal.

Kolaborasi antara pemerintah, industri pariwisata, dan masyarakat lokal sangat penting untuk menjaga kelestarian lingkup pengembangan pariwisata Kepulauan Mandeh agar pertumbuhannya dapat berlangsung secara berkelanjutan dan menghasilkan keuntungan ekonomi bagi masyarakat lokal sambil mempertahankan keindahan alam dan keberagaman hayati yang menjadi daya tarik utama dari wilayah tersebut.

Pariwisata di Kepulauan Mandeh, Padang, terus berkembang meskipun banyak masalah hukum yang rumit. Untuk menjamin pertumbuhan pariwisata yang berkelanjutan dan sesuai dengan hukum yang berlaku, terdapat beberapa masalah hukum yang perlu diatasi meskipun destinasi ini memiliki banyak potensi.

Perlindungan lingkungan adalah salah satu masalah utama yang dihadapi. Ekosistem Kepulauan Mandeh yang sangat sensitif terancam oleh aktivitas manusia. Ini termasuk terumbu karang, hutan mangrove, dan keanekaragaman hayati laut. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang ketat untuk menjaga sumber daya alam dan ekosistem saat ini serta memfasilitasi operasi industri pariwisata yang ramah lingkungan.

Selain itu, masalah kepemilikan tanah di Kepulauan Mandeh juga menjadi kendala yang signifikan dalam pengembangan pariwisata. Tanah tersebut mungkin dimiliki oleh masyarakat adat, pemerintah daerah, atau pihak swasta, yang masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda tentang bagaimana tanah tersebut dapat digunakan untuk tujuan pariwisata. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa kepemilikan tanah dan pembentukan peraturan yang jelas tentang bagaimana tanah tersebut dapat digunakan untuk tujuan pariwisata menjadi

Selain masalah lingkungan dan kepemilikan tanah, pembentukan infrastruktur pariwisata seperti jalan, pelabuhan, dan akomodasi membutuhkan perencanaan yang cermat dan perizinan yang tepat sesuai dengan undang-undang. Untuk memastikan pembangunan infrastruktur pariwisata, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta sangat penting.

Tantangan lainnya yang perlu diatasi adalah terkait dengan aspek sosial dan budaya. Pengembangan pariwisata dapat berdampak pada pola hidup, nilai-nilai budaya, dan tradisi lokal masyarakat setempat. Oleh karena itu, perlu adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat, serta pelibatan mereka dalam pengambilan keputusan terkait dengan pengembangan pariwisata. Pemahaman yang mendalam tentang budaya lokal dan kesejahteraan masyarakat menjadi kunci untuk mengatasi tantangan ini.

Dengan memahami dan mengatasi berbagai tantangan hukum yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata di Kepulauan Mandeh, Padang, kita dapat menciptakan kerangka kerja



yang kokoh untuk pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, menguntungkan, dan memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat.

### **2.3 Hak-Hak Masyarakat Adat dalam Konteks Pariwisata di Kepulauan Mandeh**

Untuk mengembangkan industri pariwisata di Kepulauan Mandeh, hak-hak masyarakat adat harus diprioritaskan. Hubungan yang kuat dengan tanah, budaya, dan warisan lokal adalah bagian penting dari identitas masyarakat adat di wilayah ini. Mereka menjaga adat istiadat lokal dan pengetahuan yang penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan mempertahankan keunikan destinasi pariwisata.

Hak atas tanah dan sumber daya alam merupakan komponen penting dari hak-hak masyarakat adat. Masyarakat adat Kepulauan Mandeh sering memiliki tanah secara turun-temurun. Orang-orang ini memiliki pengetahuan yang kuat tentang cara menggunakan tanah dan sumber daya alam secara berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam pembangunan pariwisata, pengakuan dan perlindungan hak kepemilikan tanah mereka sangat penting. Ini menjaga keberagaman budaya dan keberlanjutan lingkungan sambil menjaga masyarakat adat memiliki kontrol dan akses ke tanah mereka.

Hak masyarakat adat tidak hanya mencakup hak atas tanah, tetapi juga hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pertumbuhan pariwisata. Keterlibatan mereka dalam proses perencanaan, implementasi, dan pengawasan proyek pariwisata sangat penting untuk memastikan kepentingan mereka dipenuhi dan dihargai. Selain itu, ini memungkinkan mereka untuk berkontribusi pada pembangunan pariwisata dengan menyebarkan keahlian tradisional mereka dalam pengelolaan lingkungan dan budaya.

Namun, pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat tidak mudah. Kadang-kadang, pertumbuhan pariwisata dapat mengganggu kepentingan masyarakat adat, terutama yang berkaitan dengan hak atas tanah dan sumber daya alam. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa ada sarana penyelesaian sengketa yang efisien dan adil, dan bahwa kepentingan semua pihak yang terlibat dipertimbangkan dalam keputusan yang dibuat.

Dalam konteks pengembangan pariwisata di Kepulauan Mandeh, kolaborasi antara pemerintah, industri pariwisata, dan masyarakat adat menjadi kunci. Melalui dialog yang terbuka dan inklusif, serta kemitraan yang berkelanjutan, kita dapat menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, inklusif, dan berdampak positif bagi semua pihak yang terlibat. Dengan memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat dihormati dan diperhatikan, kita dapat membangun industri pariwisata yang menghargai keberagaman budaya, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal.

#### **2.4 Peraturan Kepemilikan Tanah dan Pembangunan Infrastruktur dalam Pengembangan Pariwisata di Kepulauan Mandeh**

Pertumbuhan pariwisata Kepulauan Mandeh sangat dipengaruhi oleh peraturan mengenai kepemilikan tanah dan pembangunan infrastruktur. Tanah di wilayah ini sering kali dimiliki oleh masyarakat adat, pemerintah daerah, dan pihak swasta. Hal ini dapat menimbulkan masalah saat menggunakan tanah untuk proyek pariwisata seperti pembangunan resor atau fasilitas wisata lainnya. Ini dapat termasuk konflik kepentingan antara berbagai pihak, serta kompleksitas dalam proses perizinan dan perencanaan.

Keputusan tentang investasi dan pengembangan infrastruktur pariwisata di Kepulauan Mandeh dapat dipengaruhi oleh peraturan yang mengatur kepemilikan tanah. Ketidakpastian tentang kepemilikan tanah dapat menghambat investasi dan memperlambat proses pengembangan proyek pariwisata, tetapi peraturan yang jelas dan transparan tentang kepemilikan tanah dapat mendorong pertumbuhan industri pariwisata.

Selain itu, pembangunan infrastruktur juga memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan pariwisata Kepulauan Mandeh. Jika pariwisata ingin berkembang dengan cepat, infrastruktur yang memadai seperti jalan, pelabuhan, bandara, dan akomodasi harus ada. Namun, pembangunan infrastruktur juga dapat menyebabkan masalah lingkungan seperti deforestasi, kerusakan lingkungan, dan peningkatan polusi. Oleh karena itu, peraturan yang ketat perlu diterapkan saat membangun infrastruktur untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Selain dampak lingkungan, pembangunan infrastruktur juga dapat berdampak pada masyarakat lokal. Proyek infrastruktur pariwisata dapat menyebabkan perubahan dalam pola

hidup, mata pencaharian, dan nilai budaya masyarakat setempat. Oleh karena itu, perlu adanya peraturan yang memperhatikan hak-hak masyarakat lokal dan memastikan bahwa mereka terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan pembangunan infrastruktur.

Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan peraturan yang seimbang dan berkelanjutan tentang kepemilikan tanah dan pembangunan infrastruktur. Peraturan tersebut harus memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk masyarakat adat, investor, dan masyarakat lokal. Dengan mengembangkan peraturan yang memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi, Kepulauan Mandeh dapat mengelola pengembangan pariwisata dengan cara yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, menjaga kelestarian alam dan budaya, sambil memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.

## KESIMPULAN

Dari Makalah yg penulis susun di atas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan pariwisata di Kepulauan Mandeh, Padang, memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Konsep pariwisata berkelanjutan menjadi landasan utama untuk memastikan bahwa pertumbuhan industri pariwisata tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Perlindungan lingkungan, pengakuan hak-hak masyarakat adat, serta peraturan yang mengatur kepemilikan tanah dan pembangunan infrastruktur menjadi kunci dalam menghadapi tantangan dan memastikan keberhasilan pariwisata yang berkelanjutan di wilayah ini.

Perlindungan lingkungan menjadi fokus utama karena Kepulauan Mandeh terkenal dengan keindahan alamnya, termasuk ekosistem laut yang kaya dan terumbu karang yang menakjubkan. Untuk itu, pengendalian polusi, pengelolaan limbah, dan keberlanjutan sumber daya alam menjadi prioritas dalam pengembangan pariwisata. Selain itu, pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat adalah penting untuk memastikan keberlanjutan budaya dan partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata.

Selanjutnya, peraturan yang jelas tentang kepemilikan tanah dan pembangunan infrastruktur juga diperlukan untuk mengatasi kompleksitas dalam proses pengembangan pariwisata. Ini akan menciptakan kepastian hukum bagi investor dan mendorong pertumbuhan industri pariwisata. Namun, peraturan tersebut juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat adat dan lingkungan untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dilakukan secara bertanggung jawab.

Dengan menerapkan pendekatan yang berkelanjutan dan memperhatikan berbagai aspek tersebut, Kepulauan Mandeh dapat menjadi model bagi destinasi pariwisata lainnya dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sambil menjaga kelestarian alam dan budaya. Kolaborasi antara pemerintah, industri pariwisata, dan masyarakat lokal menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan dan tindakan yang mengarah pada pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, Kepulauan Mandeh memiliki potensi besar untuk menjadi destinasi pariwisata yang sukses dan berkelanjutan di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arliman, Laurensius. "Peran Investasi dalam Kebijakan Pembangunan Ekonomi Bidang Pariwisata di Provinsi Sumatera Barat." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20.2 (2018): 273-294
- Gelgel, I. Putu. "Hukum Kepariwisata dan Kearifan Lokal." (2021).
- Khambra, Khairul Rifqi, and Dwi Astuti Palupi. "Pengelolaan Wisata Bahari Di Pulau Kapo-Kapo Puncak Mandeh Ditinjau Dari Hukum Internasional Di Indonesia." *Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Law, Bung Hatta University* 12.1: 1-6.
- Madalina, Maria, and Ayub Torry SK. "HUKUM KEPARIWISATAAN & NEGARA KESEJAHTERAAN."